

Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Azhari Alpad

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Kutacane, Aceh, Indonesia

Email : azharialpad24@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa kontribusi yang bersifat wajib diarahkan pihak pribadi atau pun sebuah badan kepada daerah dengan adanya sifat memaksa yang selaras dengan perundang-undangan, serta tidak adanya imbalan secara langsung yang kemudian diterapkan dalam proses pemakmuran daerah itu sendiri serta masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai nilai yang selaras setiap tahunnya dengan nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dengan demikian, pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, baik itu dalam segi perhotelan dan restoran (rumah makan).

Kata kunci: Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

Analysis of the Effect of Regional Taxes on Economic Growth in Aceh Province

Abstract

The Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes states that mandatory contributions are directed by private parties or an entity to the regions with a coercive nature that is in line with the legislation, as well as the absence of direct compensation which is then applied in the prosperity process. the area itself and its people. This study aims to analyze the effect of local taxes on the economic growth of Aceh province. This research uses a qualitative approach with a literature study method. The results of this study conclude that local taxes have a value that is in line with the value of economic growth in Aceh Province. Thus, local taxes have a significant influence on economic growth in the region, both in terms of hotels and restaurants.

Keywords: Local Taxes, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tingkat dua dengan pembangunan ekonominya dijadikan sebagai awal berkembangnya pembangunan di daerah tersebut, serta didukung dengan potensi yang terdapat di daerah itu. Dengan pengelolaan potensi serta komponen masyarakatnya menjadi salah satu proses pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan ekonomi daerah (Afriзал, 2018). Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menjadi satu di antara beberapa landasan yang dipedomani oleh yuridis dalam mengembangkan otonomi daerah di Indonesia.

Dengan pengelolaan potensi serta komponen masyarakatnya menjadi salah satu proses pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan ekonomi daerah. Hal inilah yang menjadi acuan pemerintah agar lebih bijak dalam penetapan serta pemungutan pajak daerah (Adisasmita, 2011). Dengan mengalokasikan dana hasil pemungutan pajak dalam peningkatan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tahapan peningkatan produksi mempunyai ikatan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu produksi dalam bentuk jasa ataupun barang. Artinya, pertumbuhan ekonomi terjadi dengan adanya output masyarakat terhadap suatu hal, yang dipengaruhi oleh meningkatnya faktor produksi dalam suatu bidang (Chairil, 2016; Zahari, 2017). Tingkatan *output* dalam suatu perekonomian bukanlah satu-satunya indikator dalam pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan indikasi mengenai aktifitas perekonomian yang dirasakan selama satu periode dan menghasilkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Tabel 1. Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Aceh

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2015	1.172.685.149.787,00	-
2016	1.252.745.084.804,00	6,82
2017	1.315.393.895.060	5,00
2018	1.309.081.813,53	-0,47
2019	1.509.791.063,99	15,33

Sumber : BPS Aceh, 2020

Pada tabel (1) terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh semenjak tahun 2015-2019, terjadi peningkatan tertinggi di tahun 2019, dengan nilai 15.33%. Hal tersebut merupakan hasil dalam penerapan pemerintah dalam target PAD (Pendapatan Asli Daerah), dalam sektor pajak di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017, peningkatan yang dirasakan berkisar 6.82%, dan 5.00% dikarenakan adanya pemutihan pajak atas kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Masyarakat hanya diwajibkan membayar pajak yang kendaraan bermotor pada tahun yang berjalan saat itu. Sedangkan pada 2018, terjadi penurunan pada pajak daerah senilai 0.47%, yang disebabkan oleh penurunan tarif pajak bahan bakar pada waktu tersebut (Dewi & Budhi, 2018). Banyaknya masyarakat yang membeli kendaraan bermotor tidak sesuai dengan masyarakat yang membayar pajaknya dengan alasan biayanya yang cukup mahal.

Dengan menerapkan konsep perhitungan perubahan atas PDRB dalam harga konstan per tahun berpengaruh dalam laju pertumbuhan ekonomi serta dijadikan sebagai indikator makro guna memastikan perekonomian secara riil dalam suatu wilayah. Pendapatan asli daerah diterima atas topangan setiap aktivitas perekonomian di masyarakat maupun pemerintahan yang diupayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PDRB dijadikan sebagai acuan dalam menilai pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, dan tidak memperhatikan pertumbuhan penduduknya.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Provinsi Aceh

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Perkembangan (%)
2015	112.665.532,27	-
2016	116.374.299,89	3,29
2017	121.240.978,72	4,18
2018	126.824.491,42	4,60
2019	132.087.460,00	4,14

Sumber : BPS Aceh, 2020

Tabel (2) menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2019, PDRB di wilayah tersebut meningkat. Di tahun 2016, peningkatan mencapai 3.29%, yang disebabkan oleh pengoptimalan sektor non-migas oleh pemerintah setempat. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017, berkisar 4.18%, yang disebabkan oleh dunia pertambangan yang membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, peningkatan yang terjadi berkisar 4.60%, peningkatan penggunaan produk dan jasa yang selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sedangkan pada tahun 2019, terjadi penurunan senilai 4.14%, yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas produksi.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus pembahasan penelitian ini ialah menganalisa pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Sumber data penelitian diperoleh dari laman kredibel berupa *google cendekia* dan *Sinta*. Adapun karya ilmiah yang diambil sebagai referensi meliputi artikel ilmiah, prosiding, buku dan tugas akhir (skripsi, tesis, atau disertasi). Uji keabsahan penelitian ini menggunakan ketekunan pengamatan dan mengkroscek data penelitian (Assingkily, 2021; Moleong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah di Aceh

Pajak daerah merupakan salah satu penerapan daerah dalam menetapkan iuran wajib bagi masyarakatnya baik secara pribadi maupun badan, dan tidak adanya imbalan langsung yang seimbang, dan hal tersebut tergolong paksaan selaras dengan aturan perundang-undangan, di mana dana tersebut akan digunakan dalam proses penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah, yang sesuai dengan fungsinya. Perhatikan tabel (3) berikut:

Tabel 3. Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Aceh

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2005	455.352.555.276	-
2006	309.612.956.242	-32,00
2007	411.482.682.733	32,90
2008	464.317.354.502	12,84
2009	268.453.009.839	-1,93
2010	521.326.412.818	14,48
2011	586.181.445.846	12,44
2012	687.476.816.747	17,28
2013	752.846.745.436	9,50
2014	1.030.679.175.160	36,90
2015	1.172.685.149.787	13,77
2016	1.252.745.084.804	6,82
2017	1.315.393.895.060	5,00
2018	1.309.081.813.533	-0,47
2019	1.509.791.063,99	15,33

Sumber : BPS Aceh, 2020

Tabel (3) tersebut menyatakan bahwa Provinsi Aceh menerima pajak daerah sejak 2005-2019, dengan nilai yang relatif tidak stabil. Penurunan yang terjadi pada tahun 2006

diakibatkan oleh dampak tsunami Aceh yang terjadi dua tahun sebelumnya, dan memberikan pengaruh besar dalam berbagai bentuk usaha di kota tersebut. Sedangkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2007, masyarakat mulai bangkit atas musibah tersebut dengan inovasi usaha yang lebih kreatif (Mardiasmo, 2011). Peningkatan terbesar diraih pada tahun 2014, yakni 36.9%, yang disebabkan oleh adanya beberapa program prioritas dalam proses pencapaian visi dan misi pemerintahan Aceh.

Pertumbuhan Ekonomi di Aceh

Pertambahan *output* per kapita dalam jangka panjang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berbentuk proses, bukan dalam gambaran dalam waktu singkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu barang dengan harga yang konstan dipergunakan dalam mencari tahu besarnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Tabel 4. Perkembangan PDRB Provinsi Aceh

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Perkembangan (%)
2005	111.314.881,56	-
2006	113.050.959,49	1,55
2007	110.379.801,36	-2,36
2008	104.558.794,47	-5,27
2009	98.883.556,37	-5,47
2010	101.545.236,8	2,74
2011	104.874.211,2	3,27
2012	108.914.897,6	3,85
2013	111.755.826,6	2,60
2014	113.490.359,3	1,55
2015	112.665.532,3	-0,72
2016	116.374.299,89	3,29
2017	121.240.978,72	4,18
2018	126.824.491,42	4,60
2019	132.087.460,00	4,14

Sumber : BPS Aceh, 2020

Data tersebut menyatakan adanya perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan atas dasar harga berlaku (ADHK) Provinsi Aceh sejak tahun 2015-2019. Penyebab naik turunnya nilai perkembangan setiap tahunnya disebabkan oleh stabilnya PDRB dalam industri pertanian, perkembangan laju inflasi, serta meningkatnya sumber daya manusia di daerah tersebut (Setiawan, 2013; Waluyo, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran perekonomian serta pembangunan di suatu daerah adalah diberlakukannya PAD dari sektor perpajakan. Pengelolaan sektor swasta serta meningkatnya sumber daya masyarakat juga turut berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran perekonomian serta pembangunan di suatu daerah adalah diberlakukannya PAD dari sektor perpajakan. Pengelolaan sektor swasta serta meningkatnya sumber daya masyarakat juga turut berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh. Pajak daerah mempunyai nilai yang selaras setiap tahunnya dengan nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dengan demikian, pajak

daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, baik itu dalam segi perhotelan dan restoran (rumah makan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, A. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizal, A. (2018). Analisis Penerimaan Retribusi Daerah dan Perannya Terhadap PAD Kabupaten Aceh Timur. *Skripsi*, Langsa: Universitas Samudra Langsa.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Chairil, C. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Skripsi*, Langsa: Universitas Samudra Langsa.
- Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695-1722. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1545145&val=984&title=Analisis%20Pengaruh%20Pajak%20Daerah%20Retribusi%20Daerah%20Terhadap%20Tenaga%20Kerja%20Dan%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Di%20Kota%20Palangka%20Raya%20Provinsi%20Kalimantan%20Tengah>.
- Mardiasmo, M. (2011). *Perpajakan*, edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, B. (2013). *Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Waluyo, H. (2011). *Perpajakan Indonesia, buku 1 edisi revisi V*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 133-148. <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/11>.